

Menciptakan Pemimpin Ideal Dalam Masyarakat

Rachmad Ilham, S. Ant, M.PSDM.,HC*¹, Moh. Ilham Fauzi*²

^{1,2}Universitas Gresik

³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gresik

*e-mail:rachmadilham@unigres.ac.id¹, ilhamoji14@gmail.com²

Abstrak

Eksistensi seorang pemimpin berkaitan dengan aspek panutan, pengayoman, dan pengambilan keputusan. Pemimpin berdiri di baris terdepan dalam menciptakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Persepsi awal masyarakat terhadap tokoh yang diyakini sebagai sosok pemimpin ideal kerap terpatahkan dengan pola kebijakan yang diambil pasca terpilihnya figur tersebut sebagai pemimpin. Hal ini berlaku pula dalam tingkat pemerintahan desa hingga provinsi. Potret sosial ini cukup riskan sebab menyimpan bahaya laten berupa timbulnya kekecewaan rakyat terhadap pemimpin. Penulisan artikel ini bertujuan (1) mendeskripsikan figur pemimpin ideal yang didambakan oleh masyarakat dan (2) menjelaskan pentingnya aspek kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan zaman. Penulisan ini dilakukan secara deskriptif analitis dengan studi pustaka. Hasilnya diperoleh: (1) Terdapat aspek yang dirindukan kehadirannya secara konsisten di lingkungan masyarakat seperti integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Karakteristik pemimpin yang positif mampu menciptakan optimisme masyarakat dalam menatap masa depan. (2) Kepemimpinan yang dilandasi oleh fondasi karakter berbudi luhur diperlukan dalam menghadapi dinamika zaman yang cepat berubah.

Kata kunci: pemimpin, panutan, tantangan zaman, karakteristik

Abstract

The existence of a leader is related to the aspects of role models, protection, and decision making. Leaders stand at the forefront of creating the realization of community welfare. The public's initial perception of the figure who is believed to be an ideal leader is often broken by the pattern of policies taken after the election of the figure as a leader. This also applies at the village to provincial levels of government. This social portrait is quite risky because it saves a latent danger in the form of people's disappointment with the leader. Writing this article aims to (1) describe the ideal leader figure coveted by the community and (2) explain the importance of leadership aspects that are able to answer the challenges of the times. This writing is done in descriptive analytical with literature study. The results were obtained: (1) There are aspects that are missed consistently in the community, such as integrity, fairness, and responsibility. The characteristics of positive leaders are able to create public optimism in looking at the future. (2) Leadership based on the foundation of virtuous character is needed in dealing with the dynamics of a rapidly changing era

Keywords: leader, example, challenges of the times, characteristics

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam posisinya secara individu atau kolektif. Tujuan hidup yang tersebar dalam ranah politik, ekonomi, hingga sosial berkaitan erat dengan aspek ruang di mana manusia tinggal. Ruang yang berkembang dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga negara menciptakan konsekuensi logis terhadap dibutuhkannya sosok pemimpin. Hal ini bersifat vital sebab dalam setiap unsur keruangan terdapat banyak manusia yang menghuni dengan keinginan tentang kehidupan yang beraneka ragam. Dalam mengakomodir kehendak tersebut, figur pemimpin diperlukan dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki. Pemimpin berkaitan dengan kemampuan menjawab aspirasi dari orang-orang yang dipimpinnya (Butet Kartaredjasa, 2013).

Berbicara mengenai pemimpin memang bukan hal yang baru dalam sejarah kehidupan manusia. Di dalam corak kehidupan masa pra aksara dikenal istilah primus inter pares yang berfokus pada pemilihan pemimpin berdasarkan unsur kelebihan yang dimiliki. Primus inter pares berhubungan dengan faktor fisik dan non fisik yang melekat dalam diri manusia. Seseorang yang kuat fisiknya dianggap mampu menjadi pemimpin dengan kemampuan melindungi masyarakat yang ia pimpin. Hal yang sama juga berlaku bagi seseorang yang memiliki kewibawaan dan kecakapan dalam mengatasi persoalan maka ia dipandang juga layak berposisi sebagai pemimpin (Herimanto, 2015). Tingkat visioner, kemampuan dalam mendengarkan pendapat, kemampuan mengorganisasi kelompok, kapabilitas dalam menciptakan persatuan, hingga pemahaman terhadap permasalahan keseharian menjadi ragam dimensi yang mewarnai kriteria pemimpin dalam sistem primus inter pares. Permasalahan hidup yang kompleks memicu diperlukannya pemimpin yang mampu menawarkan solusi jitu. Tidak mengherankan jika pemimpin identik dengan citra penyelesaian masalah masyarakat.

Dari masa ke masa, masyarakat memiliki gambaran pemimpin ideal yang didambakan. Cara mengilustrasikan sosok pemimpin tidak jarang dikaitkan dengan mitos yang berkembang di masyarakat. Mitos berhubungan dengan wahana bahasa pada aneka peristiwa yang dilihat manusia sifatnya sangat esensial dan memiliki arti mendalam bagi masa lampau, masa kini, dan masa depan (P. Swantoro, 2017). Ramalan dalam Jangka Jayabaya diyakini sebagai landasan dalam memandang figur pemimpin.

Ratu adil, erucakra, dan satrio piningit menjadi acuan terhadap besarnya harapan masyarakat terhadap terbebasnya diri dari kondisi krisis berkepanjangan. Kerinduan pada sektor kepemimpinan yang dapat diandalkan di seluruh lini kehidupan menyebabkan dimensi ilmiah dan non ilmiah tidak dipusingkan masyarakat. Atas dasar mitos berbasis kemunculan tokoh baru yang dipercaya mampu menghadirkan pencerahan kehidupan tersebut kemudian timbul penetapan secara tidak langsung oleh masyarakat yang memandang Diponegoro dan Soekarno adalah orang yang selama ini dicari dalam dua kurun waktu yang berbeda (Mindiptono Akbar dkk, 2010).

Klaim terhadap sosok pemimpin yang dicari dapat berubah cepat ketika kepercayaan terhadap terselesaikannya masalah tidak kunjung tercapai. Pasca ditangkapnya Diponegoro oleh De Kock, masyarakat tersadar bahwa keyakinan terhadap erucakra mulai bergeser (Peter Carey, 2012). Secara karakter dan kemampuan kepemimpinan memang didapati dalam diri Diponegoro, namun terciptanya kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera merupakan impian yang dikejar masyarakat. Masuk akal apabila hingga di setiap zaman terdapat tokoh yang dijagokan sebagai juru selamat yang selama ini dinantikan. Ketika Soekarno tampil dengan sejuta pesonanya sejak era pergerakan nasional, perlahan sinar terangnya memudar di era Demokrasi Terpimpin (Peter Kasenda, 2014). Pada dasarnya sosok pemimpin adalah manusia biasa. Begitu pula masyarakat yang melihat saat seorang pemimpin belum dapat menjawab segi keidealan yang diinginkan, maka akan terdapat tokoh lain yang diyakini sebagai subyek berikutnya.

Sifat-sifat positif yang dimiliki seorang pemimpin dipercaya mampu membawa dampak yang baik bagi masyarakat yang dipimpin. Selama ini tebaran janji manis dalam masa kampanye menjadi pemandangan yang jamak dijumpai. Kesejahteraan yang tercapai, pendidikan yang maju, dan penanganan hukum yang optimal menjadi contoh narasi yang diiklankan calon pemimpin. Hal yang kemudian menjadi potret sosial adalah ditinggalkannya janji politik dengan berbagai dalih pasca terpilihnya sebagai pemimpin melalui jalur konstitusi (Pandji Pragiwaksono, 2019). Fenomena ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat namun juga memperlihatkan pentingnya keserasian antara janji politik dengan tindakan perwujudannya. Pemimpin yang lari dari janji politiknya memiliki kecenderungan yang berbanding lurus dengan

ketidakmampuan untuk menciptakan kehidupan pemerintahan yang harmonis. Hal ini patut disayangkan mengingat jika janji politik sebagai aspek awal yang seharusnya dipenuhi saja tidak ditempatkan sebagai prioritas maka apa kabarnya dengan arah kemudi bangsa ini. Setiap masa memiliki permasalahannya sendiri dan setiap zaman mempunyai masing-masing tantangannya. Melihat tantangan zaman di masa pandemi covid-19 yang kian pelik, diperlukan kepemimpinan nasional yang mampu menjawab tantangan dengan keberanian dan inovasi yang dimiliki. Modal yang dimiliki berupa kekuatan kabinet yang solid seharusnya dapat dijadikan bekal berharga dalam mewujudkan Indonesia yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Politik sebagai fondasi kepemimpinan seyogyanya tidak menyandera pemimpin dengan potensi jebaknya. Bangsa ini memerlukan kepemimpinan yang sigap dalam menanggapi gejala yang terjadi lingkup nasional dan internasional.

2. METODE

Kepemimpinan merupakan aspek yang vital bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu wilayah dapat bergerak menuju kehancuran apabila dipimpin oleh orang yang salah. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Kepemimpinan yang baik adalah gabungan antara buah pikiran yang menjelma ke dalam karakter serta proses interaksi sosial yang menumbuhkan diri sebagai pribadi yang peka terhadap permasalahan sosial di lingkungan sekitarnya (Peter Kasenda, 2014). Bukubuku yang dibaca memiliki pengaruh besar terhadap alam pikiran seorang pemimpin. Gambaran nyatanya adalah kegandrungan Soekarno terhadap literatur yang membahas tokoh politik dan negarawan secara tidak langsung telah membentuk diri Soekarno seperti apa yang kemudian dikenal dalam narasi sejarah. George Washington, Thomas Jefferson, Jean Jacques Rousseau, Jean Jaures, Voltaire, Gladstone, Mazzini, Cavour, dan Danton adalah nama-nama tokoh yang sepak terjangnya ia baca dengan serius. Kisah dari tokoh yang dibaca tidak saja sekadar hadir sebagai wawasan saja, Soekarno bahkan mengimajinasikan dirinya andai berada di posisi orang yang terdapat dalam bukunya tersebut (P. Swantoro, 2017). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kepemimpinan memerlukan kecerdasan dalam berwawasan dan bertindak.

Terdapat istilah lawas yang menyatakan bahwa pemimpin itu diciptakan dan bukannya dilahirkan. Banyak pemimpin hebat di dunia ini tumbuh berkembang melalui proses penempaan diri yang keras. Soekarno, Hatta, dan Sutan Syahrir tidak serta merta hadir sebagai pemimpin secara otomatis. Mereka merintis karir panjang dan menapakkan langkah politiknya satu per satu. Pemimpin dalam konsep kebangsaan ini tidak muncul karena wahyu melainkan karena adanya keterpanggilan jiwa terhadap kondisi negeri yang memerlukan kontribusi nyata dalam menciptakan potret kehidupan yang lebih baik ke depannya (Ong Hok Ham, 2018). Rasa turut memiliki terhadap bangsa yang kemudian mendorong diri untuk mengambil tanggung jawab dalam memimpin masyarakat Indonesia.

Dalam posisinya sebagai pemimpin, aspek keteladanan menjadi hal pokok yang patut dijaga sebaik-baiknya. Masyarakat memandang pemimpin mereka sebagai orang yang seluruh perkataan dan perilakunya layak dijadikan panutan. Pemimpin menjadi standar patron bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Dengan pemikiran logis tersebut maka terdapat pemikiran agar pemimpin dengan teladannya mampu dijadikan gambaran ideal bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak (Pandji Pragiwaksono, 2019). Oleh sebab itu akan sulit diterima jika terjadi kasus yang menjerat seorang pemimpin dan memosisikannya sebagai figur yang kurang tepat diteladani. Kepercayaan yang dinodai menjadi harga mahal yang harus dibayar dan memerlukan waktu yang tidak singkat untuk memulihkannya.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada masyarakat Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, sebagai informan. Pengambilan data berupa wawancara ditempuh guna memperoleh pandangan masyarakat masa kini mengenai tema penelitian. Di sisi lain, dokumentasi digunakan agar memperoleh hasil penelitian yang utuh. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Hal ini penting agar gambaran mengenai tema penelitian dapat dilakukan kroscek melalui wawancara di lapangan dan dokumentasi pustaka. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Kemudo pada bulan September 2021.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pemimpin Ideal

Corak kehidupan masyarakat Indonesia identik dengan terbiasanya diri dengan dimensi perjuangan. Hal yang dimaksud dengan perjuangan dalam hal ini bermakna luas seperti lingkup ekonomi, sosial, hingga politik (R.Z. Leirissa dkk, 2012). Kehidupan bangsa di Indonesia selama era kolonialisme Barat dan penjajahan Jepang sesungguhnya telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memikirkan fase kehidupan yang lebih menggembirakan. Kekejaman pihak kolonial yang memeras tenaga masyarakat dengan aneka peraturan kontroversial dan menciptakan potret kehidupan yang jauh dari kata layak telah menimbulkan bibit harapan terhadap datangnya hari di mana kolonialisme tumbang. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras dan kerja cerdas yang tidak mudah. Selain itu faktor pemimpin yang mampu mengakomodir perjuangan rakyat turut menjadi impian yang diapungkan (M.C. Ricklefs, 2016).

Harapan terhadap adanya pemimpin semakin mengemuka ketika kesadaran bangsa mulai terbentuk di masa pergerakan nasional. Bermunculannya golongan terpelajar yang disertai organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, PNI, dan PKI mendorong terbukanya optimisme kemerdekaan mengingat terdapat banyak anak muda berbakat dengan potensi cemerlang (Slamet Muljana, 2008). Organisasi-organisasi tersebut memiliki corak pergerakan yang tidak sepenuhnya homogen namun memiliki satu tujuan yakni mencapai Indonesia merdeka. Eksistensi organisasi memperoleh hadangan hebat dari pemerintah kolonial Belanda. Dipenjarakannya tokoh-tokoh penyeru kemerdekaan menunjukkan bahwa Belanda terganggu dengan aksi organisasi pergerakan nasional. Hal ini menimbulkan citra dalam penglihatan masyarakat bahwa para tokoh yang dikenai sanksi oleh Belanda telah menunjukkan sifat kepemimpinan yang sejati.

Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan apa yang diucapkan secara verbal, melainkan juga terletak pada apa yang dilakukan secara nyata. Dipenjarakannya tokoh pergerakan nasional dinilai sebagai konsekuensi logis dari besarnya hasrat dalam mengusir kekuasaan Belanda dari Nusantara (Deliar Noer, 2012). Wajar jika persepsi pemimpin ideal melekat pada para tokoh yang gagah berani berjuang menghadapi Belanda. Pada masa tersebut menjadi pihak yang paling dimusuhi dan diburu Belanda

merupakan patokan sederhana seberapa besar tingkat perjuangan menumpas penjajahan. Usai kemerdekaan diraih pada tahun 1945 dan dikuatkan kedaulatannya melalui Konferensi Meja Bundar, konsep ideal seorang pemimpin bergeser dari semula ke aspek kemerdekaan menjadi ranah kompetensi mengelola negara. Poin yang terakhir ini relevan menjadi acuan hingga saat ini mengingat kompleksitas urusan negara memerlukan pemimpin yang andal.

Seorang pemimpin diharapkan sekaligus dituntut untuk mampu menuntaskan permasalahan seluruh bidang kehidupan rakyatnya. Pemimpin tidak hanya jago di satu bidang saja namun keteteran di bidang lainnya. Kecakapan dari pemimpin idealnya merata di semua lini. Dalam diri Soekarno, kehebatannya dalam memimpin di ranah politik tidak diragukan. Kebijakan politik domestik dan internasional di masa pemerintahannya tidak hanya menciptakan rasa percaya di benak rakyat namun juga membuat Indonesia disegani di mata dunia. Amerika Serikat yang berambisi menjadi negara nomor satu saat Perang Dingin turut mengakui kemampuan Soekarno dalam mengelola negara (Baskara T. Wardaya, 2008). Sayangnya hal ini kurang terlihat dalam hal lain seperti perekonomian. Dunia ekonomi era Orde Lama dapat dikatakan kurang mengilap. Indonesia jauh dari kata sejahtera dan mapan secara ekonomi. Meskipun Indonesia sukses menggelar Asian Games dan Ganefo yang menelan biaya yang tidak murah, citra negara yang berkilauan sebenarnya mengaburkan realitas masyarakat di kalangan akar rumput. Hal ini menunjukkan bahwa Soekarno adalah manusia biasa yang tidak dapat tampil maksimal di seluruh bidang kehidupan. Di satu sisi kekurangan tersebut menjadi permakluman. Di sisi lain menyebabkan munculnya kriteria lain yang dimasukkan dalam memandang konsep pemimpin ideal dari seorang tokoh.

Figur Soeharto sempat menempati konsep pemimpin ideal di hati masyarakat. Soeharto menjadi primadona rakyat Indonesia setelah di awal naik takhtanya sebagai presiden mampu menunjukkan bahwa ia berbeda dengan pendahulunya. Inovasi di bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang gencar relatif memikat masyarakat sehingga ruang kosong dalam aspek ketercapaian target ekonomi di era Soekarno mampu terlihat nyata di era Orde Baru (Jusuf Wanandi, 2014). Keriangan era Orde Baru pada praktiknya berjalan beriringan dengan sisi gelap pemerintahan dalam ranah penegakan hak asasi manusia (HAM). Kebijakan terhadap orang-orang yang dicap

sebagai komunis, cara membasmi kriminalitas secara sepihak, hingga penanganan terhadap aksi mahasiswa yang dilakukan secara brutal mewarnai kiprah Soeharto di pemerintahan. Di titik ini masyarakat memandang bahwa dimensi ekonomi yang gemilang di era Orde Baru harus disertai aspek HAM yang terbilang horor. Istilah klasik yang berbunyi bahwa “harga sembako di zaman Orde Baru murah namun nyawa manusia juga murah” menjadikan stigma terkekang dan otoriter melekat dalam diri Soeharto sebagai pemimpin (Baskara T. Wardaya, 2007).

Menanyakan pada masyarakat di masa kini, pandangan perihal konsep pemimpin ideal didapati dari hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Kemudo. Dalam proses pengambilan data yang melibatkan warga lintas profesi mulai dari petani, pedagang, karyawan, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga tersebut diperoleh kriteria yang diinginkan mereka selaku warga sipil. Pemimpin yang berintegritas menjadi hal yang paling diinginkan oleh masyarakat. Sosok pemimpin yang jujur dan perkataannya selaras dengan perbuatannya adalah konsep ideal yang duharapkan masyarakat. Munculnya patokan ini didasari dari janji politik yang cepat menguap saat tokoh tersebut telah resmi dilantik sebagai pemimpin. Akumulasi kekecewaan tersebut membentuk pandangan warga yang mengutamakan integritas dalam melihat figur pemimpin. Pemimpin yang mampu bersikap adil turut masuk ke dalam konsep keidealan pemimpin. Pengalaman warga di masa pandemi covid-19 dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dipandang belum mewujudkan rasa keadilan yang sejalan dengan bunyi sila kelima dalam Pancasila.

Adanya perlakuan yang berbeda antara sesama warga sipil dalam kebijakan yang dirilis pemerintah mendorong kebutuhan terhadap pemimpin yang adil mengemuka. Sosok pemimpin yang bertanggung jawab menjadi gambaran keidealan yang juga dinantikan oleh masyarakat. Figur pemimpin yang tidak berkecenderungan lepas tangan dan melempar tanggung jawab kepada pihak lain dirindukan eksistensinya di zaman digital ini.

B. Pemimpin dan Tantangan Zaman yang Dihadapi

Tantangan bagi seorang pemimpin di setiap era tidak sama. Dinamika dunia secara global yang sangat elastis menyebabkan kompleksitas tantangan kehidupan

semakin meningkat. Era 4.0 yang identik dengan pesatnya kemajuan ranah digital memicu semakin banyaknya tantangan yang wajib dihadapi oleh pemimpin di Indonesia. Tantangan dapat dilihat sebagai potensi penghambat kinerja, namun dapat pula dipandang sebagai kesempatan untuk menaklukkannya agar kompetensi diri meningkat. Tantangan zaman yang menghampiri diri pemimpin sejatinya adalah ujian layak tidaknya ia memimpin masyarakat (Ong Hok Ham, 2018).

Di masa kini, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemimpin terbilang mudah ditemukan. Adanya teknologi media sosial yang kerap memberitakan pencapaian pemerintahan, kegagalan dalam kebijakan negara, hingga isu-isu politik yang hangat di kalangan masyarakat menjadi bahan yang mudah menyulut emosi rakyat. Keterbukaan akses informasi ibarat menjadi pisau bermata dua. Masyarakat dapat turut memantau jalannya roda pemerintahan dan masyarakat juga cenderung tidak mudah mentoleransi setiap kesalahan yang dilakukan pemimpin, bahkan untuk memberikan kesempatan perbaikan juga terkadang menjadi barang langka.

Hasil wawancara dengan warga Desa Kemudo dan pengambilan data dari dokumentasi pustaka menemukan fakta bahwa penegakan hukum yang tidak pandang bulu adalah tantangan zaman yang berada di puncak prioritas. Dikatakan menempati prioritas pertama sebab buruknya penanganan masalah hukum dapat berimbas pada terganggunya sendi-sendi kehidupan lainnya. Penegakan hukum yang baik berkorelasi positif dengan terjaminnya HAM bagi setiap warga. HAM yang terjamin akan menciptakan kehidupan masyarakat yang bersuasana sarat dengan keadilan dan ketenteraman (Zeffry Alkatiri, 2010). Selama ini masyarakat menilai jalannya penegakan hukum masih jauh dari titik sempurna. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas menjadi pengetahuan umum yang tidak lagi menjadi rahasia sebab keberadaannya kian terang benderang.

Jika merunut ke belakang, dapat dijumpai kasus Sum Kuning, Marsinah, Udin, Semanggi, Trisakti, penculikan aktivis 1998, dan insiden Munir yang masih menyisakan tanda tanya gelap. Kegagalan dalam penegakan hukum dilihat semakin menunjukkan sisi anehnya ketika melihat vonis hukuman terhadap Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, Juliari Batubara, dan deretan koruptor kelas kakap lainnya yang disanksi kurang berat. Teka-teki seputar sepiunya perkembangan penanganan kasus Harun

Masiku hingga pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mayoritas dari mereka sedang menangani kasus-kasus besar turut mengapungkan rasa heran pada pemerintah. Masyarakat percaya bahwa setiap pemimpin tentu ingin mempersembahkan hal yang terbaik. Sayangnya perlu disadari pula bahwa kekuasaan pemimpin tidak terlepas dari mesin politik yang mendukung di belakangnya. Mesin politik bernama partai politik rentan untuk menyandera independensi seorang pemimpin dalam bersikap. Kebijakan presiden diwajibkan seiya sekata dengan kehendak partai. Konflik kepentingan yang melibatkan partai, pemimpin yang diusung partai, serta anggota partai yang terjerat kasus hukum rentan menimbulkan ketimpangan dalam penanganan kasusnya. Hal seperti ini memicu kurang beraninya pemimpin dalam bersikap sebab terdapat ikatan politik yang membelenggu setiap langkah yang hendak ditempuh.

Tantangan zaman berupa kekuatan mayoritas menjadi poin yang tidak mudah dihadapi. Sepintas secara teori terlihat mudah namun praktiknya sukar karena melawan kekuatan besar berpotensi mendatangkan kesulitan besar pula di belakangnya. Hal ini dapat dilihat dalam insiden yang melibatkan pihak mayoritas melawan minoritas. Salah satu contohnya adalah kasus pembangunan gereja di wilayah Prambanan yang terhambat izinnya. Secara prosedur, langkah-langkah perizinan telah ditempuh dan relasi pihak gereja dengan masyarakat di sekitar gereja yang notabene berbeda agama terbilang harmonis. Meski demikian bertahun-tahun pasca rencana pembangunan gereja diapungkan ke permukaan, hingga kini urusan pembangunannya jauh dari kata memulai. Ironisnya, berdasarkan hasil wawancara pada warga ditemukan informasi yang menyatakan bahwa belum cairnya izin pembangunan gereja konon pernah dimanfaatkan oleh oknum calon pimpinan daerah yang hendak maju ke arena pemilihan pimpinan tingkat daerah. Negara seharusnya menjamin aspek peribadatan setiap warganya dengan optimal. Berpijak dari salah satu insiden tersebut, masyarakat menilai bahwa kemampuan untuk berani bersikap berseberangan dengan pihak mayoritas adalah tantangan zaman yang kerap muncul. Berani karena benar dan takut karena salah pada kenyataannya belum terwujud nyata di kehidupan negeri ini. Karakteristik, mentalitas, dan keteguhan hati dari seorang pemimpin diperlukan dalam menjawab setiap tantangan zaman.

4. KESIMPULAN

Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Berkembangnya zaman menyebabkan semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan di kalangan masyarakat yang memerlukan penyelesaian. Kehadiran sosok pemimpin yang mampu menjadi penyelesai masalah didambakan oleh masyarakat. Konsep pemimpin ideal pada dasarnya menitikberatkan pada kecakapan dan karakteristik yang melekat pada diri pemimpin. Figur pemimpin yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab menjadi gambaran keidealan diri pemimpin yang dipandang dari perspektif masyarakat.

Dalam menjalankan roda kepemimpinan seyogyanya pemimpin mampu menjaga independensinya dari faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kebijakan strategis seperti partai politik dan golongan mayoritas. Pemimpin yang senantiasa dicintai masyarakatnya adalah pemimpin yang mampu mengemban amanat rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar dkk, Mindiptono. (2010). *Sabda Ramalan*. Yogyakarta: Ekspresi Buku.
- Alkatiri, Zeffry. (2010). *Belajar Memahami HAM*. Depok: Ruas.
- Ham, Ong Hok. (2018). *Wahyu yang Hilang Negeri yang Guncang*. Jakarta: KPG.
- Herimanto. (2015). *Sejarah Indonesia Masa Pra Aksara*. Yogyakarta: Ombak.
- Kartaredjasa, Butet. (2013). *Presiden Guyonan*. Jakarta: Noura Books.
- Kasenda, Peter. (2014). *Bung Karno Panglima Revolusi*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Leirissa, R.Z & Ohorella, G.A & Tangkilisan, Yuda B. (2012). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Muljana, Slamet. (2008). *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan Jilid 1*. Yogyakarta: LkiS.
- Noer, Deliar. 2012. *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Kompas.
- Pragiwaksono, Pandji. (2019). *Septictank: Pengalaman Nyemplung ke Kolam Politik*. Yogyakarta: Bentang.
- Swantoro, P. (2017). *Dari Buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta: KPG.

Wanandi, Jusuf. (2014). *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998*. Jakarta: Kompas.

Wardaya, Baskara T. (2007). *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*. Yogyakarta: Galang Press.

Wardaya, Baskara T. (2008). *Indonesia Melawan Amerika: Konflik Perang Dingin 1953-1963*. Yogyakarta: Galang Press.